

**PERANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
SEBAGAI KOORDINATOR PENYALURAN LOGISTIK
SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DI KOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Rahmad Faldin
NPP. 29.1613

*Asdaf Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: rahmadfaldin99615@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Flood is a disaster that often occurs in Kendari City after the fire disaster because it is traversed by two major rivers, the Wanggu River and the Sampara River. Disaster emergency response when a flood occurs is the most crucial stage, especially related to meeting the basic needs of flood victims. The author takes as an example the case of logistics distribution during the 2017 flood in Kendari City, there are still many problems including excess stock of goods for non-urgent needs, uneven distribution of aid to disaster victims and the slow distribution of victims affected by floods in Kendari City. **Purpose:** The purpose of this study is to determine, analyze and describe the role of the Kendari City Regional Disaster Management Agency in terms of logistics distribution during the flood emergency response in Kendari City as well as the inhibiting factors and efforts made in overcoming these obstacles. **Methods:** This study uses a qualitative method with a qualitative approach. inductive. The object of research is the Kendari City Regional Disaster Management Agency. The research analysis was carried out using the role theory of Henry Mitznberg dala, Siswanto (2012) with three dimensions, namely, interpersonal roles, roles related to information and decision making roles. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study are that the Kendari City Regional Disaster Management Agency is the coordinator in terms of logistics distribution who is responsible for every activity starting from planning to logistics distribution in Kendari City, this is based on role theory analysis according to Mitznberg in Siswanto (2012), of the three dimensions, only the decision-making dimension does not meet the expected criteria. There are three inhibiting factors, namely, facilities and infrastructure that have not been maximized, lack of human resources and budget constraints. In overcoming these three inhibiting factors, the Kendari City Regional Disaster Management Agency made various efforts, namely, improving and improving facilities and infrastructure at the Kendari City BPBD, increasing the capacity of human resources at the Kendari City BPBD and collaborating with the private sector and related OPD. **Conclusion:** The Kendari City Regional Disaster Management Agency is the coordinator in terms of logistics distribution who is responsible for every activity starting from planning to logistics distribution in Kendari City, this is based on role theory analysis according to Mitznberg in Siswanto (2012), of the three dimensions only the decision-making dimension that do not meet the expected criteria. There are three inhibiting factors and there are also three efforts made by the Kendari City Regional Disaster Management Agency.

Keywords: *Floods, Logistics Distribution, BPBD*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kota Kendari setelah bencana kebakaran karena dilalui oleh dua sungai besar yakni, Sungai Wanggu dan Sungai Sampara. Tanggap darurat bencana saat terjadi banjir merupakan tahapan yang paling krusial terutama terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana banjir. Penulis mengambil contoh kasus penyaluran logistik saat bencana banjir tahun 2017 di Kota Kendari masih banyak terdapat permasalahan diantaranya kelebihan stok barang untuk kebutuhan yang tidak mendesak, distribusi bantuan kepada korban bencana yang kurang merata serta lambannya pendistribusian terhadap korban terdampak bencana banjir di Kota Kendari. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam hal penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Obyek penelitian adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Analisis penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Peranan dari Henry Mintzberg dalam Siswanto (2012) dengan tiga dimensi yakni, Peranan antar pribadi, Peranan yang berhubungan dengan informasi dan Peranan Pengambilan keputusan. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari merupakan koordinator dalam hal penyaluran logistik yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga penyaluran logistik di Kota Kendari hal ini berdasarkan analisis teori peranan menurut Mintzberg dalam Siswanto (2012), dari ketiga dimensi hanya dimensi Pengambilan keputusan yang belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Terdapat tiga faktor yang menjadi penghambat yaitu, sarana dan prasarana yang belum maksimal, kurangnya sumber daya manusia dan keterbatasan anggaran. Dalam mengatasi ketiga faktor penghambat tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari melakukan berbagai upaya yaitu, memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana di BPBD Kota Kendari, Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BPBD Kota Kendari dan bekerjasama dengan pihak swasta dan OPD terkait. **Kesimpulan:** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari merupakan koordinator dalam hal penyaluran logistik yang bertanggungjawab dalam setiap kegiatan yang dimulai dari perencanaan hingga penyaluran logistik di Kota Kendari hal ini berdasarkan analisis teori peranan menurut Mintzberg dalam Siswanto (2012), dari ketiga dimensi hanya dimensi Pengambilan keputusan yang belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Terdapat tiga faktor penghambat dan juga terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari.

Kata kunci: Banjir, Penyaluran logistik, BPBD

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota dengan luas 301,00 km² (30.100 Ha) dan penduduk sejumlah 343.202 (data sensus penduduk 2020) ini merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Kota kendari sering menjadi daerah langganan banjir ketika musim penghujan telah tiba, berdasarkan data dari Badan Statitistik Provinsi Sulawesi Tenggara dari tahun 2018-2020 banjir selalu terjadi di Kota Kendari. Kecamatan yang

menjadi langganan banjir di Kota Kendari yaitu, Kecamatan Kadia, Baruga, Kambu, Poasia, Abeli, Kendari Barat, Mandonga, puwatu dan wua wua.

Penyebab banjir di Kota Kendari salah satunya karena dilalui oleh sungai wanggu dan sungai sampara yang termasuk sungai besar di Sulawesi Tenggara dan juga Kota Kendari merupakan daerah muara kedua sungai tersebut sehingga ketika musim penghujan tiba luapan air dari kedua sungai besar tersebut dengan debit air yang cukup besar sehingga hal tersebut akan menyebabkan air meluap ke area pemukiman warga yang mengakibatkan banjir terjadi. Letak topografi yang termasuk dataran rendah dan pembangunan drainase yang tidak berpola dengan baik juga merupakan penyebab banjir yang terjadi.masyarakat.

Untuk mengatasi kebencanaan di Kota Kendari maka Pemerintah daerah Kota Kendari membuat Peraturan Daerah No 4 Tentang Pembentukan Organiasasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Terbentuknya BPBD diharapkan mampu mengurangi dampak dari bencana terutama ketika tanggap darurat bencana. Dalam UU No. 24 tahun 2007 pasal 26 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang yang menjadi korban bencana wajib mendapat bantuan terkait pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk itu BPBD sebagai wakil dari pemerintah daerah harus melaksanakan hal tersebut. Kebutuhan dasar yang dimaksud disini mencakup kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, air bersih, pakaian dan kebutuhan lainnya yang telah diatur lebih lanjut dalam Perka BNPB No. 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen logistik. Penyaluran logistik harus segera dilakukan pada saat tanggap darurat terjadi. Pemberian bantuan logistik sangat memperhatikan ketepatan waktu, target, lokasi, kualitas dan jumlah harus sesuai dengan kebutuhan korban.

Tabel 1. 1 Data Operasi Tanggap Darurat Banjir 2017

No	Kebutuhan	Satuan	Jumlah Kebutuhan	Tersedian	Kurang	Sumber kebutuhan
1.	Relawan	orang	120	241	0	KSB, TAGANA, PMI, Pramuka Peduli, TNI/POLRI, SATPOL PP, ORARI, RAPI, MAPALA Kota Kendari.
2.	Kendaraan roda 6	unit	6	6	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
3.	Kendaraan roda 4	unit	12	12	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
4.	BBM	liter/hari	1050	1050	0	SPBU

5.	Tenda Pengungsian	unit	12	12	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
6.	Tenda dapur umum	unit	6	6	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
7.	Tenda Posko	unit	6	6	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
8.	Tenda kesehatan	unit	6	6	0	TNI/POLRI, DINSOS, SATPOL PP, BPBD
9.	Genset	unit	6	2	4	BPBD
10.	Peralatan dapur umum (1 paket)	unit	6	6	0	DINSOS, BPBD, TNI, POLRI
11.	Beras	kg/7 hari	7397.6	0	7397.6	DINSOS
12.	Lauk Pauk					
13.	Pakaian	stel	5284	0	5284	DINSOS, BPBD
14.	Minyak Goreng	liter/7 hari	1056	0	1056	DINSOS, BPBD
15.	Minyak Tanah	liter/7 hari	1056	0	1056	DINSOS, BPBD

Sumber: Rencana Operasi Tanggap Darurat Bencana Banjir Kota Kendari 2017

Berdasarkan tabel diatas jumlah ketersediaan barang dan jumlah kebutuhan di lapangan masih memiliki jumlah yang tidak sesuai. Penyaluran logistik yang dilakukan tentu saja mengalami banyak permasalahan. Penulis mengambil contoh kasus penyaluran logistik saat bencana banjir tahun 2017 di Kota Kendari masih banyak terdapat permasalahan diantaranya stok barang berlebih untuk kebutuhan yang tidak mendesak, penyaluran bantuan terhadap korban bencana yang kurang merata serta lambannya pendistribusian terhadap korban terdampak bencana banjir di Kota Kendari

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Bencana Banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kota Kendari setelah Bencana Kebakaran hal ini disebabkan karena Kota Kendari merupakan daerah muara kedua sungai besar yang ada di Sulawesi Tenggara, letak topografi yang termasuk dataran rendah dan juga pembangunan drainase yang tidak berpola dengan baik juga merupakan penyebab banjir di Kota Kendari. Tahapan yang paling krusial saat terjadi bencana adalah tahap tanggap darurat yang didalamnya terdapat penyaluran logistik yang harus segera dilakukan saat tanggap darurat terjadi.

Terdapat banyak permasalahan dalam penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari.berdasarkan tabel rencana operasi tanggap darurat yang terdapat di pendahuluan, terlihat jelas bahwa jumlah ketersediaan barang dan jumlah kebutuhan di lapangan masih memiliki jumlah yang tidak sesuai.

Penulis mengambil contoh kasus penyaluran logistic saat bencana banjir di Kota Kendari tahun 2017 yang terdapat beberapa permasalahan diantaranya stok barang berlebih untuk kebutuhan yang tidak mendesak sedangkan kebutuhan dasar seperti beras, lauk pauk dan pakaian tidak tersedia saat dibutuhkan, penyaluran bantuan terhadap korban bencana yang kurang merata serta lambannya pendistribusian terhadap korban bencana banjir di karenakan ketersediaan barang dan juga sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peranan badan penanggulangan bencana daerah terkait kebencanaan sebenarnya telah banyak dilakukan dan dipublikasikan di berbagai media baik nasional maupun internasional. Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan peneliti, didapatkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki kemiripan. Penelitian pertama oleh Ischa Maburris sahilala, Sarwono, Imam Hanafi, (2015) dengan judul Tata kelola Distribusi Bantuan Logistik korban Bencana Alam (Studi Empiris Pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola distribusi bantuan logistik korban bencana alam yaitu bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro. Adapun metode dengan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini Tata kelola distribusi logistik oleh BPBD pada saat tanggap darurat banjir masih memiliki tata kelola yang kurang baik dikarenakan kualitas beras yang diterima oleh warga korban bencana kurang baik dikarenakan kurang memadainya gudang yang dimiliki BPBD dan lamanya penimbunan baik di gudang BPBD, Bulog maupun Balai Desa.

Penelitian kedua oleh Lorencia p. Barus, (2013) berjudul Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Medan yang berangkat dari minimnya lembaga yang bertanggung jawab atas kebencanaan di Kota Medan ditandai dengan BPBD yang terbentuk baru satu tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BPBD dalam penanggulangan bencana. metode yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Medan belum maksimal menjalanka peran nya dalam penanggulangan bencana dikarenakan BPBD baru terbentuk selama 1 tahun dan masih terdapat hambatan yang dihadapi seperti kurangnya koordinasi, sarana prasarana dan SDM yang belum memadai.

Penelitian ketiga oleh Ahmad Rendy Abdullah, (2015) berjudul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Tahap Kesiapsiagaan Bencana Alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran badan penanggulangan bencana daerah terkait tahapan dalam kesiapsiagaan bencana alam. Penilitan ini merupakan penelitan deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitan ini menunjukkan bahwa Peran BPBD pada tahap kesiapsiagaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sudah dilakukan melihat Rencon (Rencana Contijensi), yang dimana masih menggunakan skala prioritas pada proses penanganannya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan kajian studi penelitian sebelumnya diatas, didapatkan bahwa penelitian terkait penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir yang berlokasi di Kota Kendari masih minim dan belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Oleh karena itu penelitian ini telah mengandung nilai *novelty* atau kebaruan pengetahuan dimana topic maupun lokasi penelitian ini masih minim dilakukan.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan peranan badan penanggulangan bencana daerah sebagai koordinator penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara serta faktor penghambat dan upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penulis memberikan gambaran masalah melalui analisis dengan menggunakan saintifik sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Sugiyono, 2016:21). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yakni, wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun untuk teknik analisis data yaitu pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (conclusions)(Miles dan Huberman, 2007:16).

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 4 orang informan yang terdiri dari kepala pelaksana BPBD Kota Kendari, Kepala Sub Bagian Program dan Per-UU, Kepala Bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kota Kendari, Kepala Seksi sarana dan prasarana darurat dan logistik BPBD Kota Kendari. Selain wawancara penulis melakukan observasi secara langsung dan dokumentasi berupa rencana operasi tanggap darurat banjir di Kota Kendari dan Renstra BPBD Kota Kendari. Adapun analisisnya menggunakan teori Peranan menurut Mitznberg dalam Siswanto dan Miftah Thoha dengan dimensi, peranan antar pribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi dan peranan pengambilan keputusan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN (60-70%)

Penulis menganalisis peranan badan penanggulangan bencana daerah sebagai koordinator penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan menggunakan teori peranan menurut Mitznberg dalam Siswanto dan Miftah Thoha dengan dimensi Peranan antar pribadi, peranan yang berhubungan dengan informasi dan peranan pengambilan keputusan

3.1 Peranan Antar Pribadi

Peranan Antar Pribadi, atasan harus bertindak sebagai tokoh, sebagai pemimpin dan sebagai penghubung antar organisasi yang dikelolanya dengan komunikasi yang baik agar berjalan dengan lancar, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang berlangsung, dalam situasi tatap muka antara dua orang atau lebih, baik secara terorganisasi maupun pada kerumunan orang (Wiryanto: 2004). BPBD dalam hal penyaluran Logistik merupakan Instansi yang memiliki tanggungjawab sebagai koordinator dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD memiliki tanggung jawab dalam membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari serta melaksanakan penanggulangan yang meliputi pra bencana, saat tangap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi. Untuk menjelaskan lebih lanjut terkait dimensi peranan antar pribadi terdapat dalam indikator berikut :

a. Peranan sebagai Tokoh

Peranan sebagai Tokoh (figurehead), adalah suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya didalam setiap kesempatan formal dan tantangan yang muncul (Siswanto:2012). Berdasarkan pengertian diatas jika dikaitkan dengan peranan BPBD sebagai Koordinator Penyaluran Logistik tentu saja memiliki kaitan yang dimana sesuai dengan Undang-

Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Pelaksana BPBD pada Rabu, 19 Januari 2022 bahwa :

“Kepala BPBD adalah Sekertaris Daerah atau pejabat Ex Officio, kenapa harus ada pejabat Ex Officio karena kalau bicara koordinasi hampir sama dengan memerintah sebenarnya dan yang boleh memerintah eselon II B hanya Walikota/Bupati dan Sekertaris Daerah sehingga harus ada pejabat Ex Officio”.

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan dalam penyaluran Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan tokoh yang berperan penting karena BPBD merupakan instansi yang memiliki peranan penting terkait hal tersebut dikarenakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Lembaga Non Kementrian yang bertanggungjawab langsung terkait kebencanaan yang ada didaerah.

b. Peranan sebagai Pemimpin (Leader)

Peranan sebagai pemimpin identik dengan kepemimpinan, Menurut Sukarana (2012) kepemimpinan merupakan fungsi dari manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk motivasi anggota dalam meraih sasaran atau tujuan dari suatu organisasi. Kepemimpinan merupakan suatu tindakan pemimpin dalam mengatur dan mengarahkan setiap unit yang berada di bawahnya agar mampu menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sehingga rencana yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut dapat tercapai tepat sasaran.

Kepala Pelaksana BPBD dalam kehidupan organisasi BPBD bertanggungjawab secara langsung di dalam kehidupan organisasi di dalam internal BPBD. Struktur organisasi BPBD pada dasarnya sama seperti struktur organisasi pemerintahan lainnya yaitu berbentuk stuktural sehingga terdapat hirearkhi antara atasan dan bawahan. Dalam melaksanakan kegiatan organisasi secara struktural diperlukan koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan.\

c. Peranan sebagai Pejabat Perantara

Perananan sebagai pejabat perantara dalam peranan ini atasan terlibat dengan rekan kerja, staf, dan pihak lain diluar organisasi untuk mengumpulkan informasi, peranan ini sangat berkaitan dengan koordinasi horizontal. Hashibuan dalam Rahmeina (2018:4) menyebutkan bahwa koordinasi horizontal merupakan koordinasi tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan dalam organisasi yang setingkat. Berdasarkan pengertian tentang koordinasi horizontal tersebut sama dengan Peranan sebagai pejabat perantara dimana ada koordinasi yang dilakukan dengan organisasi lain.

Penyaluran logistik yang dilakukan pada saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari tidak hanya melibatkan internal BPBD saja tetapi melibatkan instansi lain yang ikut serta dalam penyaluran logistik. Hal ini sesuai dengan Fungsi Pengkomandoan yang dimiliki oleh Kepala Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui penerahan sumber daya manusia, peralatan logistik dari Satuan Perangkat Kerja Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana (Peraturan Walikota Kendari Nomor tahun 2011 pasal 9).

Hal ini senada dengan wawancara yang penulis lakukan bersama bapak Paminuddin sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari pada Rabu, 19 januari 2022:

“OPD ini tidak hanya OPD sebenarnya dek, pertama itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang kedua Dinas Sosial, yang ketiga ada pemerhati lingkungan terlibat juga didalamnya kemudian banyak organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam pendistribusian Logistik termasuk Dinas PU, Kesehatan dan terkait dengan data ada CAPIL, terkait dengan penanganan penyelamatan selain BPBD ada juga Lingkungan Hidup untuk melakukan

pembersihan-pembersihan baik disaat kejadian maupun pasca kejadian jadi kurang lebih sepuluh atau lebih lah OPD yang terkait termasuk organisasi kemasyarakatan”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa dalam penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari ikut melibatkan instansi lain yang dapat membantu mempermudah pelaksanaan penyaluran logistik dalam hal ini BPBD Kota Kendari menjadi koordinator dalam pelaksanaannya telah melaksanakan koordinasi yang baik sehingga penyaluran logistik pada saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari telah terlaksana dengan baik.

3.2 Peranan yang Berhubungan dengan Informasi

Informasi merupakan unsur penting terutama pada saat tanggap darurat bencana. Informasi awal dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan suatu keputusan. Menurut Kelly (2011:10), informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Informasi sangat diperlukan dalam hal penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari terutama terkait jumlah korban yang ada di lokasi banjir, dengan adanya informasi terkait jumlah korban BPBD dapat mempersiapkan kebutuhan yang akan disalurkan ke korban banjir agar tepat sasaran, lebih lanjut terkait Peranan yang berhubungan informasi ini terdapat pada tiga indikator berikut :

a. Peranan Pemantau (monitor)

Peranan ini mengidentifikasi seorang atasan sebagai penerima dan mengumpulkan informasi. Menurut Siswanto (2012: 20) informasi yang diterima oleh atasan ini dapat dikelompokkan atas lima kategori berikut :

- 1) internal operations, yang meliputi informasi tentang kemajuan pelaksanaan pekerjaan dalam organisasi, dan semua peristiwa yang ada berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- 2) Kejadian diluar organisasi (external events), informasi jenis ini diterima oleh atasan dari eksternal organisasi.
- 3) Informasi dari hasil analisis, semua analisis dan laporan mengenai berbagai isu yang diperoleh dari berbagai sumber , sangat bermanfaat bagi atasan untuk diketahui.
- 4) Buah pikiran dan kecendrungan, atasan membutuhkan suatu sasaran untuk mengembangkan suatu pengertian atas kecendrungan-kecendrungan yang tumbuh dalam masyarakat, dan mempelajari tentang ide-ide atau buah pikiran.
- 5) Tekanan-tekanan, atasan juga perlu mengetahui informasi yang ditimbulkan dari tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu

Berdasarkan kelima kategori diatas dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan peranan pemantau BPBD Kota Kendari sebagai Pengumpul informasi yang ada di lapangan dengan memperhatikan segala aspek yang ada. Untuk menghadapi dan menangani situasi darurat yang disebabkan bencana banjir informasi yang didapatkan menjadi sangat krusial sehingga BPBD akan mengambil tindakan untuk melaksanakan penanganan tanggap darurat bencana sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.

b. Peranan sebagai Deseminator

Pada peranan ini atasan terlibat untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinya. Penyebaran informasi, menurut Hanafi (2014: 22), adalah penyebaran pesan yang berisi fakta (data yang sesuai dengan kenyataan). Disamping itu, penyebaran bersifat kegiatan komunikatif yang satu arah atau one way traffic of communication, namun dalam perkembangan selanjutnya serta penerapannya mengalami modifikasi atau perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan dari penyebaran informasi.\

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari sebagai koordinator penyaluran logistik pada saat menerima informasi terkait tanggap darurat banjir baik dari Pusdalops PB, Tim Reaksi Cepat, informasi dari masyarakat, media online maupun televisi langsung mentransmisikan informasi yang ada dan informasi yang ada dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari sebagai koordinator penyaluran logistik pada saat menerima informasi terkait tanggap darurat banjir baik dari Pusdalops PB, Tim Reaksi Cepat, informasi dari masyarakat, media online maupun televisi langsung mentransmisikan informasi yang ada dan informasi yang ada dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan kegiatan.

c. Peranan sebagai Juru bicara

Peranan ini dimainkan atasan untuk menyampaikan informasi ke luar lingkungan organisasinya. Menurut Thoha (2007:16) sebagai juru bicara (spokesman) secara formal pemimpin mewakili atau bertindak atas nama organisasinya, sebagai pemimpin mereka merupakan pusat informasi, yang mengetahui banyak tentang organisasinya. Untuk itu mereka bertindak efektif dalam mewakili organisasinya. Dalam hal Penyaluran logistik Kepala Pelaksana BPBD telah melakukan koordinasi dan kerjasama yang dijalin antara stakeholder yang berkepentingan dapat memperlancar mekanisme pendistribusian bantuan logistik bagi korban bencana banjir di Kota Kendari, dengan membentuk pos komando penanganan tanggap darurat bencana.

Penyampaian informasi kepada Organisasi lain oleh BPBD dilakukan pada saat rapat koordinasi terkait Penyelerasan pendapat dan data terkait Penanganan bencana banjir Kota Kendari yang dihadiri Walikota Kendari, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari, OPD di wilayah Kota Kendari, TNI-POLRI dan NGO. Hal ini selaras dengan wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari pada Selasa 18 Januari 2022:

“Iya benar pada saat status keadaan bencana banjir memasuki status siaga ke darurat banjir maka akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Walikota Kendari selaku penanggungjawab di Kota Kendari, BPBD, OPD yang terlibat, tak lupa juga Tentara dan Kepolisian guna bertukar pendapat yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh Tim Reaksi Cepat BPBD Kota Kendari, hal ini dilakukan sebagai pertimbangan awal terkait rencana aksi yang akan dilakukan oleh sektor posko terkait kedaruratan bencana yang terjadi dek”

Berdasarkan uraian diatas dan hasil wawancara yang ada BPBD Kota Kendari pada saat status banjir dari siaga ke darurat segera melakukan rapat koordinasi guna menyampaikan dan bertukar pendapat terkait data yang dikumpulkan oleh TRC BPBD untuk menyusun rencana aksi apa yang akan dilakukan kedepannya.

3.3 Peranan Pengambilan Keputusan

Menurut Miftah Thoha (2007: 16) berkesimpulan bahwa sebagian besar tugas pemimpin pada hakikatnya digunakan secara penuh untuk memikirkan sistem pembuatan strategi organisasinya. Keterlibatan pemimpin dalam pengambilan keputusan disebabkan karena :

1. Secara otoritas formal adalah satu-satunya yang diperbolehkan ikut serta untuk memikirkan tindakan yang penting atau yang baru dalam organisasinya
2. sebagai pusat informasi, atasan dapat memberikan jaminan atas keputusan yang terbaik, yang mencerminkan pengetahuan terbaru dan nilai-nilai organisasi.
3. keputusan-keputusan yang strategis akan lebih mudah diambil secara terpadu dengan adanya satu orang yang dapat melakukan kontrol atas semuanya.

BPBD Kota Kendari dalam hal penyaluran Logistik terlibat langsung dalam pembuatan keputusan terkait pembuatan strategi dalam hal ini termuat dalam rencana kontinjensi Kota Kendari dapat dipedomani hingga tercapai penyaluran logistik yang efektif dan efisien. Terkait peranan pengambilan keputusan dijelaskan lebih lanjut pada indikator terkait pengambilan keputusan yaitu:

a. Peranan sebagai Penghalau Gangguan

Thoha (2006: 18) mengatakan dalam peranan sebagai penghalau gangguan, seorang pemimpin menghadapi krisis yang mendadak yang tidak dapat diabaikan, yang berbeda dengan masalah-masalah yang dipecahkan secara sukarela oleh pemimpin tersebut agar dapat memanfaatkan peluang yang ada. Krisis tersebut disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak diduga seperti konflik bawahan, kehilangan seorang bawahan penting, kebakaran atau kecelakaan, pemogokan dan lain sebagainya. Seorang pemimpin harus berperan aktif dalam penanganan konflik yang terjadi.

Situasi darurat yang disebabkan bencana banjir dapat menjadi konflik di masyarakat sehingga dalam rangka menghadapi dan mengatasi situasi tersebut, maka pemerintah Kota Kendari melalui BPBD mengambil beberapa kebijakan yang menjadi landasan kegiatan penanggulangan bencana banjir pada tahap tanggap darurat. Berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Kontinjensi terkait penanganan bencana banjir diatas dapat membantu mengatasi konflik yang terjadi karena BPBD telah menyiapkan kebijakan yang dapat dipedomani pada tahap pelaksanaan.

b. Peranan sebagai Pembagi Sumber Daya

Para Pemimpin menggunakan kekuasaan mereka untuk mengalokasi sumber – sumber daya yang dimiliki organisasi baik dana, personalia, material, peralatan, fasilitas – fasilitas, dan jasa – jasa. Menurut Thoha(2007 : 19) membagi sumber daya adalah suatu proses pembuatan keputusan. Peranan ini memutuskan kemana sumber daya akan didistribusikan ke bagian – bagian dari organisasi yang dipimpinya. Strategi harus ditetapkan, pandangan – pandangan yang jauh dan positif harus dilihat pemimpin, sehingga alokasi sumber daya dapat diberikan sebaik mungkin.

Pembagian sumber daya yang dilakukan harus sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan sehingga informasi yang diterima juga harus sesuai dengan kejadian di lapangan agar pembagian sumber daya yang dilakukan dapat tepat sasaran. BPBD Kota Kendari dalam hal penanganan darurat bencana banjir termasuk didalamnya penyaluran logistik telah menyiapkan strategi agar kegiatan penanggulangan bencana dapat terkoordinasi dengan baik.

Berdasarkan strategi yang tertuang dalam rencana kontinjensi tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari dapat dijadikan acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam hal pembagian sumber daya sehingga pelaksanaan penyaluran Logistik dapat terlaksana dengan baik.

c. Peranan sebagai Perunding

Perundingan adalah kegiatan menggabungkan pengetahuan dan kekuatan seseorang untuk menentukan perilaku pihak lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam hal penyaluran logistik salah satunya melakukan perundingan pada saat rapat koordinasi bersama sektor logistik. Adapun sasaran sektor logistik sesuai dengan dokumen rencana kontinjensi bencana banjir 2020 yaitu:

a) Terpenuhinya dukungan logistik yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana.

b) Tersedianya personil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penerimaan dan penyaluran bantuan

c) Tersedianya mekanisme kerja yang baik, teratur dan terarah, yaitu tersedianya pemetaan kebutuhan dan penyaluran bantuan yang cepat dan tepat sasaran

- d) Terdatanya jumlah, jenis, dan sumber bantuan yang diterima oleh Instansi/ SKPD/ sektor dan pihak lainnya
 - e) Terpenuhinya dan tersalurkannya kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi masyarakat di wilayah bencana secara cepat, tepat dan merata sesuai dengan prosedur penerimaan dan penyaluran bantuan
 - f) Terselenggaranya pengawasan, monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan sesuai dengan prosedur yang disepakati dengan melibatkan berbagai unsur terkait
 - g) Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinergitas antar sektor dalam penanganan tanggap darurat
- Berdasarkan uraian diatas terkait peranan BPBD sebagai perunding telah melaksanakan tugasnya dengan melakukan perundingan bersama dengan instansi yang terkait pada saat rapat koordinasi dimana BPBD sebagai Koordinator dalam sektor logistik.

3.4 Faktor Penghambat Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Koordinator Penyaluran Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Kendari

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari diketahui masih ada ditemukan hambatan dalam Penyaluran Logistik saat tanggap darurat Bencana Banjir di Kota Kendari. Berikut ini penulis menguraikan beberapa hambatan:

1. Sarana dan prasarana yang belum Maksimal

Selama penulis melakukan penelitian, penulis melakukan pengamatan terhadap sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari. Masih banyak alat-alat penunjang yang kurang seperti perahu karet yang sudah rusak, kurangnya tenda pengungsi dan mobil serbaguna yang sudah rusak hal tersebut tentu saja menghambat proses kegiatan yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari.

Akibat kurangnya sarana dan prasarana tersebut menghambat proses Penyaluran Logistik hal senada disampaikan oleh Bapak Sajid, S.Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kota Kendari pada Rabu, 19 Januari 2022 beliau mengatakan :

“saat ini pihak kami untuk sarana dan prasarana belum maksimal sedangkan ketika terjadi bencana banyak terutama memasuki tahap tanggap darurat pihak kami mengalami kewalahan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat, salah satunya yang sering kami alami di lapangan adalah ketika terjadi bencana dan terdapat banyak masyarakat yang mengungsi kami sering kekurangan tenda untuk masyarakat korban bencana dan juga kami sering mengalami kewalahan dalam mendistribusikan bantuan logistik kepada masyarakat karena kurangnya alat pengangkut barang, banyak kendaraan yang tidak dapat berfungsi.”

2. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Hasil pengamatan penulis di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari penulis melihat masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menyebabkan proses Penyaluran logistik kurang maksimal. Hal ini diperkuat dengan wawancara penulis dengan dengan Bapak Paminuddin, S.E., M.Si selaku Kepala BPBD Kota Kendari pada Rabu, 19 Januari 2022 beliau mengatakan :

“Mengenai pelayanan yang kami berikan memang dari jumlah petugas yang ada dalam setiap bidangnya kami masih kekurangan Sumber Daya Manusia, terutama ketika tahap tanggap darurat bencana sehingga ketika terjadi bencana kami sering mengalami kekurangan personil untuk di terjunkan di lapangan dan juga karena sebagian besar Sumber Daya Manusia yang kami punya kebanyakan hanya tenaga kontrak dan juga relawan yang hampir sebagian besarnya hanya lulusan SMA sehingga membuat kami tidak bisa kinerjanya di lapangan tidak begitu maksimal. Namun kami juga berharap kedepannya ada perekrutan

pegawai baru yang berkompeten dan mempunyai kemampuan yang mumpuni sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat”.

Dari hasil wawancara dan pengamatan penulis, penulis menyimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari belum maksimal karena masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan baik dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga dalam melaksanakan programnya sering mengalami kendala.

3. Keterbatasan Anggaran

Kendala yang terakhir dan sering di alami banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu kurang optimalnya dana yang didapat, dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Kendari juga memiliki keterbatasan dana dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Kendari. Minimnya anggaran untuk operasional menyebabkan ketersediaan logistik untuk didistribusikan tidak memenuhi permintaan dilapangan dan juga penyediaan personil kedaruratan untuk membantu tugas di lapangan pada saat penyaluran logistik bencana banjir.

3.5 Upaya Yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam menghadapi hambatan dalam Penyaluran Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana Banjir di Kota Kendari

Upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam mengatasi faktor penghambat agar penyaluran logistik dapat terlaksana sesuai dengan dan untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana banjir dilakukan dengan berbagai cara guna mencapai hasil yang maksimal.

1. Memperbaiki dan Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga kedepannya diharapkan proses dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana banjir. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara penulis dengan Bapak Sajid, S.Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Kota Kendari pada Rabu, 18 Januari 2022 beliau mengatakan:

“sejauh ini mengenai saran dan prasarana yang kami punya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari belum maksimal, namun kami dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari terus berupaya untuk membenahi sarana dan prasarana yang ada, walaupun dengan keterbatasan yang ada kami tidak patah semangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama saat tanggap darurat bencana banjir dan kami berharap kedepannya ada pembenahan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang kami punya”.

2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari melakukan upaya untuk mengatasi terkait kurangnya sumber daya manusia. Berikut ini merupakan wawancara penulis dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari Bapak Paminuddin selaku Kepala BPBD Kota Kendari pada Rabu, 18 Januari 2022 beliau mengatakan :

“Peningkatan kapasitas aparatur merupakan salah strategi dalam mengurangi resiko bencana banjir. Aparatur yang profesional akan lebih mudah menciptakan kondisi aman bagi masyarakat. Melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis kita selalu mengarahkan aparatur agar siap sedia dalam kondisi apapun. Selain itu melalui instansi ini kami memberikan penyuluhan tertentu kepada masyarakat sehingga dengan dua hal ini akan mengurangi resiko kesalahan saat penyaluran logistik bencana banjir di Kota Kendari memang dalam memberikan pelayanan dalam rangka untuk penyaluran logistik bencana banjir kepada

masyarakat kami sering mengalami kewalahan karena kurangnya jumlah pegawai sehingga kami telah mengusulkan untuk penambahan pegawai yang berkompeten sesuai bidangnya untuk menunjang proses pelayanan yang terjadi di sini. Sehingga diharapkan kedepannya petugas kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam rangka untuk mengurangi risiko bencana banjir”.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur merupakan langkah dalam mengatasi penyaluran logistik saat tanggap daurat bencana banjir . Melalui pelatihan dan bimbingan teknis merupakan langkah dalam menciptakan tenaga aparatur yang profesional. Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis berkesimpulan bahwa dalam mengatasi faktor penghambat tersebut upaya yang dilakukan oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari yaitu menambah jumlah petugas yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya sehingga diharapkan kedepannya semua proses yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

3. Bekerjasama dengan Pihak Swasta dan OPD terkait

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari dalam menangani keterbatasan anggaran terutama terkait penyaluran logistik adalah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang ikut terlibat dalam penyaluran logistik. BPBD Kota Kendari rutin melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta karena biasanya dari pihak swasta harga yang diberikan lebih murah sehingga dapat meminimalisir anggaran yang keluar. Adapun untuk ketersediaan logistik BPBD bekerjasama dengan Dinas Sosial terkait kebutuhan dasar-kebutuhan dasar yang dibutuhkan korban bencana hal ini senada dengan wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Sajid, S.Sos selaku Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada 18 Januari 2022 :

“Ketersediaan logistik memang sering menjadi permasalahan yaitu kehabisan stok barang untuk mengatasi hal ini BPBD bekerjasama dengan Dinas Sosial baik Provinsi maupun Kota karena di Dinas Sosial biasanya barang-barang terkait kebutuhan dasar ada disana. Selain itu BPBD juga bekerjasama dengan pihak swasta untuk meminimalisir pengeluaran anggaran terutama saat tanggap darurat”.

Berdasarkan penjelasan diatas yang diperkuat dengan hasil wawancara dapat dikatakan bahwa BPBD Kota Kendari dalam mengatasi keterbatasan anggaran adalah dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta serta berkoordinasi dengan dinas sosial kota maupun provinsi agar penyaluran logistik dapat terlaksana dengan baik.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan fakta dilapangan yang dapat menjelaskan terkait kondisi termuktahir dari peranan badan penanggulangan bencana daerah saat terjadi bencana banjir terutama terkait penyaluran logistik peneliti akan menguraikannya dengan membandingkan temuan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada uraian pendahuluan. Sehingga akan didapatkan nilai kebaruan penelitian yang menyempurnakan penelitian atau kajian sebelumnya.

Penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari dapat dikatakan sudah baik didasarkan pada analisis terkait peranan BPBD sebagai koordinator penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari dimana dari tiga dimensi yang masing masing dimensi memiliki tiga indikator hanya satu indikator yang belum memenuhi kriteria yang ada. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ischa Maburris Sahilala, Sarwono, Imam Hanafi, (2015) yang tata kelola distribusi logistiknya masih kurang baik dikarenakan beras yang diterima oleh warga korban bencana kurang baik dikarenakan kurang memadainya gudang yang dimiliki BPBD dan lamanya penimbunan baik di gudang BPBD, Bulog maupun Balai Desa.

Penelitian dari Lorencia p. Barus, (2013) yang dimana BPBD Kota Medan belum maksimal menjalankan peran nya dalam penanggulangan bencana dikarenakan BPBD baru terbentuk selama 1 tahun dan masih terdapat hambatan yang dihadapi seperti kurangnya koordinasi, sarana prasarana dan SDM yang belum memadai. Walaupun terdapat permasalahan yang sama yakni terkait sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia tetapi BPBD Kota Kendari telah melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut, adapun untuk koordinasi yang dilakukan sudah sangat baik dengan melakukan kerjasama dengan instansi lain yang terkait seperti, Dinas Sosial, PMI, SAR, TNI POLRI, DUKCAPIL dan juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak swasta.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari sudah berjalan dengan baik. Simpulan tersebut didasarkan atas hasil temuan bahwa tiga dimensi yang diturunkan dari Teori Peranan menurut Mitznberg dalam Siswanto dan Miftah Thoha (2012) hanya terdapat satu indikator yang belum terpenuhi. Adapun dua dimensi operasional yang telah terpenuhi yaitu dimensi Peranan antar pribadi dengan indikator peranan sebagai tokoh, peranan sebagai pemimpin dan peranan sebagai pejabat perantara telah terpenuhi, begitupun dengan dimensi peranan berhubungan dengan informasi dengan indikator peranan pemantau, peranan sebagai deseminator, dan peranan sebagai juru bicara telah terpenuhi. Sedangkan pada dimensi peranan pengambilan keputusan terdapat tiga indikator yaitu peranan sebagai penghalau gangguan, peranan sebagai pembagi sumber daya dan peranan sebagai perunding yang dimana pada indikator peranan pembagi sumber daya belum terpenuhi. Kedua, terdapat tiga faktor penghambat yaitu, kurangnya Sumber Daya Manusia, Sarana dan prasarana yang belum maksimal dan keterbatasan anggaran. Ketiga, terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh BPBD Kota Kendari yakni, memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana di BPBD Kota Kendari, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BPBD Kota Kendari dan bekerjasama dengan pihak swasta dan OPD terkait.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penulis menyadari penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga saran dan masukan masih diperlukan.

Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator penyaluran logistik saat tanggap darurat bencana banjir di Kota Kendari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kendari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim, 2014, Analisis Laporan Keuangan., Edisi tujuh., UPPAMP YKPN, Yogyakarta.

Kelly G.S., 2011, Quercetin, *Alternative Medicine Review (AMR)*, 16 (2)

Miftah Toha. (2007). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja.Grafindo

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman, 2007, *Qualitative Data Analysis* (terjemahan), Jakarta : UI Press.

Rahmeina, F. R. & Meilani, N. L. (2018). Koordinasi dalam Program Kampung KB di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 5(1), 1-12.

Sahilala, I. M. Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Bencana Alam (Studi empiris pada Bencana Banjir Di Kabupaten Bojonegoro). *J. Adm. PublikMhs. Univ. Brawijaya*. 3, 812-817 (2015)

Siswanto. 2012. *Pengantar Manajemen*: PT.Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono.2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*: Rajawali Pers, Jakarta.

Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta

